

## BAB V

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berusaha menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, Fasilitas Umum dan Belanja Pemerintah pada Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota yang berada di Provinsi Bengkulu selama tahun 2013-2017. Alat analisis yang digunakan adalah data panel dengan model analisis *Fixed Effect* dan diselesaikan melalui program statistik komputer, yaitu *Eviews 7.0*. Hasil yang disajikan dalam bab ini adalah estimasi terbaik yang dapat memenuhi kriteria teori ekonomi, statistik maupun ekonometri. Hasil estimasi diharapkan mampu menjawab hipotesis yang diajukan dalam studi ini. Berdasarkan model regresi data panel terdapat dua jenis pendekatan, yaitu *fixed effect* dan *random effect*. Untuk menentukan model yang sesuai, peneliti menggunakan komponen tahapan pengujian Uji Chow dan Uji Hausman.

#### A. Pemilihan Model

Dalam data panel terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary/pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Pemilihan model pertama kali dengan Uji Chow untuk menentukan *pooled* atau *fixed effect* yang digunakan. Pemilihan metode pengujian data digunakan pada seluruh data sampel (9 kabupaten dan 1 kota). Jika nilai F statistik pada Uji Chow signifikan, maka Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara metode *fixed effect* atau *random effect*. Uji Hausman dengan

asumsi nilai probabilitas kurang dari  $\alpha$  adalah signifikan, artinya *fixed effect* yang dipilih untuk

mengolah data panel. Pemilihan metode pengujian dilakukan dengan menggunakan pilihan *fixed effect* dan *random effect* serta mengkombinasikan *cross-section*, *period* maupun gabungan *cross-section/period*.

#### 1. Uji Chow

Menentukan model terbaik antara *fixed effect* dengan *common/pooled effect*. Jika hasilnya menerima hipotesis nol maka model terbaik adalah *common*. Akan tetapi jika hasilnya menolak hipotesis nol, maka model terbaik adalah *fixed effect* dan pengujian berlanjut ke Uji Hausman.

**Tabel 5.1**  
**Uji chow**

<b>Effects Test</b>	<b>Statistic</b>	<b>d.f.</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section F	133.045869	(9,37)	0,0000
Cross-section Chi-square	175.371639	9	0,0000

Sumber : Hasil pengolahan data panel menggunakan Eviews

Berdasarkan Uji Chow di atas, kedua nilai probabilitas *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-Square* lebih kecil dari  $\alpha$ , sehingga menolak hipotesis nol. Jadi model terbaik yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Berdasarkan hasil Uji Chow yang menunjukkan hasil menolak hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut ke Uji Hausman.

#### 2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan tahapan pengujian untuk menentukan metode terbaik antara *Random Effect* dengan *Fixed Effect*. Jika hasil dari Uji

Hausman menerima hipotesis nol, maka model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect*. Namun jika hasilnya menolak hipotesis nol, maka model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect*.

**Tabel 5.2**  
**Uji Hausman**

<b>Test Summary</b>	<b>Chi-Sq. statistik</b>	<b>Chi- S.q d.f</b>	<b>Prob.</b>
Cross- section Random	69.802363	3	0.0000

*Sumber : Hasil pengolahan data panel menggunakan Eviews*

Berdasarkan table di atas, nilai probabilitas *Cross-section random* adalah 0.0000 yakni lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan hasil menolak hipotesis nol. Jadi berdasarkan Uji Hausman, model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

### 3. Analisis Model Data Panel

Dalam penelitian ini model data panel yang digunakan adalah model *Fixed Effect Model*, model ini digunakan untuk mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *fixed effect* menggunakan teknik *variabel dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar kabupaten/kota, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, Fasilitas Umum, dan belanja pemerintah di bidang pendidikan. Namun demikian slopenya sama antar kabupaten/kota. Model

estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV) (Basuki dan Yuliadi, 2015).

**TABEL 5.3**  
Hasil Estimasi Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, Fasilitas Umum dan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap IPM di Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu

<b>Variabel Dependen :</b> <b>IPM</b>	<b>Model</b>	
	<i>Fixed Effect</i>	<i>Random Effect</i>
Konstanta	8.906900*	8.742651*
Standar error	0.115384	0.113741
<b>LKES</b>	0.031967**	0.029310**
Standar error	0.004135	0.004101
<b>LFU</b>	-0.002237	-0.001155
Standar error	0.002452	0.002441
<b>LPEND</b>	-0.032405**	-0.024602**
Standar error	0.005934	0.005839
<b>R<sup>2</sup></b>	0.981412	0.328084
<b>F-Statistik</b>	162.7935	7.486981
<b>Prob(F-Stat)</b>	0.000000	0.000350
<b>Durbin-Watson Stat</b>	1.145104	0.418917

Sumber : Hasil pengolahan data panel menggunakan Eviews

\* = 10 %

\*\* = 5%

\*\*\* = 1 %

Berdasarkan uji spesifikasi model yang dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman, hasil keduanya menyarankan untuk menggunakan model *fixed effect*. Dan dari uji pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasi Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, Fasilitas Umum dan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap IPM di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu adalah model *fixed effect*.

Model ini dipilih karena memiliki probabilitas masing-masing variable independen yang lebih signifikan dibanding model lain.

## B. Hasil Estimasi Model Regresi Panel

Setelah uji statistik untuk menentukan model yang dipilih dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada model ini, tidak diperhatikan dimensi waktu, namun individu memiliki perbedaan. Berikut tabel yang berusaha menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 10 kabupaten/kota tahun 2013-2017.

**Tabel. 5.4**  
**Hasil Estimasi *Fixed Effect Model***

Variabel Dependen : IPM	Model
	<i>Fixed Effect</i>
Konstanta	8.906900*
Standar error	0.115384
<b>LKES</b>	0.031967**
Standar error	0.004135
<b>LFU</b>	-0.002237
Standar error	0.002452
<b>LPEND</b>	-0.032405**
Standar error	0.005934
<b>R<sup>2</sup></b>	0.981412
<b>F-Statistik</b>	162.7935
<b>Prob(F-Stat)</b>	0.000000
<b>Durbin-Watson Stat</b>	1.145104

Sumber: Hasil pengolahan data panel menggunakan *Eviews*

\* = 10 %

\*\* = 5%

\*\*\* = 1 %

Dari hasil estimasi di atas, dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang disimpulkan dengan persamaan:

$$\text{LogIPM}_{it} = 8.906900 + 0.031967 * \text{LogKES} + -0.002237 * \text{LogFU} + -0.032405 * \text{LogPEND}$$

$$(\text{s.e}) = 0.115384 \quad 0.004135 \quad 0.002452 \quad 0.005934$$

$$T = 77.19323 \quad 7.730249 \quad -0.912297 \quad -5.461279$$

Keterangan :

$\beta_1 = 0.031967$ , Artinya apabila Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan naik sebesar 1 persen, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar 0.03196 poin dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*).

$\beta_2 = -0.002237$  Dengan signifikansi 5%, tidak terdapat cukup bukti bahwa Fasilitas Umum berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Bengkulu (*ceteris paribus*).

$\beta_3 = -0.032405$ , Artinya apabila Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan naik sebesar 1 persen, maka menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata sebesar -0.032405 poin dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*).

## C. Uji Statistik

### 1. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, Fasilitas Umum dan Belanja Pendidikan) memiliki hubungan terhadap IPM, oleh karena itu diperlukan pengujian dengan menggunakan uji statistik antara lain:

- a. Pengujian variabel Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap IPM untuk mengetahui apakah Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan berpengaruh atau tidak terhadap IPM dan sesuai dengan hipotesis dapat menjelaskan sebagai berikut:

Uji Hipotesis

$H_0$  = Variabel Independen Belanja Kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM.

$H_1$  = Variabel Independen Belanja Kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect* di atas, nilai probabilitas (t-statistik) variabel Belanja Kesehatan adalah  $0.0000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang artinya variabel Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM.

- b. Pengujian variabel Fasilitas Umum terhadap IPM untuk mengetahui apakah Fasilitas Umum berpengaruh atau tidak terhadap IPM dan sesuai dengan hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uji Hipotesis

$H_0$  = Variabel independen Fasilitas Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM.

$H_1$  = Variabel independen Fasilitas Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect* di atas, nilai probabilitas (t-statistik) variabel Fasilitas Umum adalah  $0.3675 < 0,05$ . Maka  $H_0$  diterima yang artinya variabel Fasilitas Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM.

- c. Pengujian variabel Belanja Pendidikan terhadap IPM untuk mengetahui apakah belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh atau tidak terhadap IPM dan sesuai dengan hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uji Hipotesis

$H_0$  = Variabel independen Belanja Pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM.

$H_1$  = Variabel independen Belanja Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM.



Berdasarkan hasil regresi *fixed effect* di atas, nilai probabilitas (t-statistik) variabel Fasilitas Umum adalah  $0.0000 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak yang artinya variabel Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM.

#### **D. Uji F**

Hasil perhitungan dengan *Fixed Effect Model* diketahui bahwa probabilitas nilai F hitung sebesar 0.000000 dan dengan ketentuan  $\alpha = 5 \%$ , dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent secara bersama-sama yang terdiri dari Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, dan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan.

#### **E. R-Squared**

Nilai R-squared atau koefisien determinasi berguna untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan himpunan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan angka antara 0 sampai 1. Nilai determinasi kecil menunjukkan kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai determinasi yang mendekati angka 1 memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Dari hasil olahan data menggunakan *fixed effect model*, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,981. Artinya sebesar 98,1 % variasi pada IPM dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel independen (Belanja Pemerintah di Bidang

Kesehatan, Fasilitas Umum, dan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan), sementara sisanya sebesar 1,89% dijelaskan oleh variasi lain di luar model.

## F. Uji Asumsi Klasik

### 1. Multikolinearitas

Menurut Ajija, dkk (2011) multikolinearitas adalah hubungan linear antar variabel independen di dalam model regresi. Untuk menguji multikolinearitas, maka digunakan metode parsial antar variabel independen. Jika koefisien korelasi cukup tinggi di atas 0,85 maka diduga ada multikolinearitas dalam penelitian. Kombinasi data *time series* dan *cross section* mengakibatkan multikolinearitas berkurang. Penggabungan data, sebenarnya secara teknis dapat dikatakan bahwa masalah multikolinearitas tidak ada (Gujarati, 2006).

**Tabel 5.5**  
Uji Multikolinearitas

	<b>LKES</b>	<b>LFU</b>	<b>LPEND</b>
<b>LKES</b>	1.000000	0.106878	0.720029
<b>LFU</b>	0.106878	1.000000	0.255556
<b>LPEND</b>	0.720029	0.255556	1.000000

*Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Eviews*

Berdasarkan pengujian metode korelasi parsial antar variabel independen di atas, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan nilai matriks covarians kurang dari 0,9.

### 2. Uji Heterokedastisitas

Gujarati (2006) menyatakan bahwa heterokedastisitas memberikan arti bahwa dalam suatu model terdapat varian residual atas observasi yang berbeda.

Cerminan penelitian yang baik adalah tidak mengandung heterokedastisitas apapun. Dalam uji ini, masalah muncul dari variasi data *cross section* yang digunakan. Uji heterokedastisitas dalam hal ini digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi.

Mendeteksi masalah heterokedastisitas dalam data panel digunakan Uji Park, di mana probabilitas semua variabel independen tidak signifikan pada tingkat 5%. Keadaan ini menunjukkan bahwa adanya varian yang sama atau terjadi homoskedastisitas antara nilai-nilai variabel independen dengan residual setiap variabel itu sendiri ( $\text{Var } U_i = \sigma_u^2$ ). Berikut ini output hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.6**  
Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park

Variabel	Prob.
C	0.3258
LKES	0.8683
LFU	0.0662
LPEND	0.8549

Sumber : Hasil pengolahan data panel menggunakan Eviews

Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas signifikansi semua variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 5% ( $>0,05$ ) sehingga tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

### **G. Uji Teori (Interpretasi Ekonomi)**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat suatu analisis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (Belanja Kesehatan, Fasilitas Umum, dan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang diinterpretasikan sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Pada hasil penelitian ini ditemukan nilai koefisien 0.031967 berarti ketika terjadi peningkatan Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan 1% maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu akan meningkat sebesar 0.031%. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Basuki & Saptutyingsih (2016) yang menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Yogyakarta. Kesehatan merupakan investasi yang berkaitan dengan pembangunan. Kesehatan merupakan faktor penting agar seseorang bisa hadir dalam pendidikan. Harapan hidup yang panjang akan meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan. Fenomena kesehatan

menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai faktor produksi untuk menambah nilai barang dan jasa, atau suatu sasaran dari tujuan yang ingin dicapai individu. Oleh karena itu, Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Undang-undang Republik Indonesia menyatakan bahwa dana untuk kesehatan yang diatur pada UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji.

## 2. Pengaruh Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Fasilitas Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada derajat kepercayaan 5% untuk semua Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang diperoleh Hadi (2018) yang menunjukkan hal serupa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengeluaran Pemerintah di Bidang Fasilitas Umum dalam hal ini adalah infrastruktur, masih sangat diperlukan. Peningkatan alokasi anggaran untuk fasilitas umum khususnya infrastruktur sangatlah penting untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk dalam meningkatkan perekonomian lokal yang pada gilirannya dapat meningkatkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat. Untuk itu, ketersediaan infrastruktur jalan harus cukup baik agar perekonomian menjadi lebih baik. Sebuah strategi yang komprehensif

untuk penyediaan infrastruktur harus mencakup diversifikasi sumber daya keuangan dan meningkatkan partisipasi sektor swasta. Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah perlu diperkuat dengan merancang kebijakan yang memperkuat pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur di suatu daerah, khususnya Provinsi Bengkulu yang notabene kaya akan sumber daya alam dapat menarik investasi swasta dan publik, yang pada gilirannya dapat menyediakan dan menyerap tenaga kerja di daerah. Diharapkan hal ini dapat menghasilkan tingkat percepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat di suatu daerah.

Belum signifikannya Fasilitas Umum terhadap IPM di Provinsi Bengkulu diakibatkan oleh alokasi dana APBD untuk Fasilitas Umum masih tergolong rendah antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Selain itu juga, keterjangkauan masyarakat untuk menikmati Fasilitas Umum masih kurang. Hal itu ditandai dengan di beberapa kabupaten/kota dengan kondisi infrastruktur yang kurang baik conthnya dikabupaten Seluma dan dibeberapa kabupaten lainnya dengan kondisi jalan masih banyak yang rusak.

Sedangkan Pembangunan di Bidang Fasilitas Umum merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Fasilitas Umum khususnya infrastruktur pun juga dapat

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB. Infrastruktur sebagai penentu fungsi produksi, yang mempunyai peran terhadap pertumbuhan pembangunan di suatu daerah, dan berfungsi menurunkan hambatan perdagangan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Devarajan & Sawoop (1993) yang mengungkapkan bahwa anggaran dalam bidang fasilitas umum diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga secara otomatis perekonomian masyarakat dapat meningkat.

### 3. Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan memiliki Pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Pada hasil penelitian ini ditemukan nilai koefisien  $-0.032405$ , berarti ketika terjadi peningkatan Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan 1% akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar  $-0.0324\%$ . Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Imron (2018) dan Soleha (2016).

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Kemendikbud (2017) dimana anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN sepenuhnya belum efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Alokasi anggaran fungsi pendidikan cukup besar digunakan untuk

membayar gaji guru dan tunjangan profesi guru. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah, maka dari itu pola pembiayaan dalam Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan tidak berdampak pada perbaikan kualitas pendidikan yang akhirnya berdampak signifikan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bengkulu.

Selain dari pada itu program-program pendidikan seperti wajib belajar 12 tahun, dan beasiswa bagi siswa kurang mampu, sepenuhnya belum berjalan secara optimal di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut dikarenakan pemerintah membutuhkan dana yang cukup banyak, selain itu juga diikuti Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang semakin meningkat setiap tahunnya, mengakibatkan semakin banyak pula biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh pemerintah. Anggaran belanja di bidang pendidikan juga tidak berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, melainkan hanya berfokus pada pembangunan sekolah secara fisik.

Soleha (2016) menyebutkan berdasarkan laporan KPK pada tahun 2014 terdapat permasalahan mendasar dalam tatakelola anggaran pendidikan. Hal tersebut diantaranya lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem administrasi, kekosongan pengawasan, dan lemahnya kontrol sosial maupun publik. Sebagai contoh adalah potensi kebocoran dana BOS yang meliputi:



- a. Manipulasi jumlah siswa penerima BOS yang bertujuan untuk mendapatkan dana BOS yang lebih besar dari jumlah siswa, dengan demikian dana tersebut tidak ada realisasinya dan diambil oleh oknum sekolah tersebut untuk pribadi.
- b. Adanya penyimpanan anggaran dana BOS di Kas Umum Daerah (KUD) dan ketika melakukan transfer dari KUD ke rekening sekolah dimungkinkan adanya kuasa dinas guna meminta bagian (kisaran variatif) 10%-50% dari total BOS dengan modus meminta bayaran administrasi.
- c. Laporan tahunan yang sering terlambat dan bahkan terjadi manipulasi laporan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dijelaskan dalam teori *good governance* oleh Todaro dan Smith (2011) diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik serta memadai. Dalam teori tersebut dijelaskan untuk mewujudkan cita-cita negara guna mensejahterahkan rakyat maka pembangunan harus berorientasi pada rakyat. Dimana ketika pemerintah mengambil suatu kebijakan harus disesuaikan dengan aspek sosial-budaya, ekonomi, sosial, dan politik.